

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (PPDW) Kota Sukabumi

Neli Hanifah¹⁾

nelihanifah070@ummi.ac.id

Risma Nurmilah²⁾

risma@ummi.ac.id

Hendra Tanjung³⁾

hendratanjung515@ummi.ac.id

^{1) 2) 3)} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ABSTRAK

Pendapatan Asli daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Masih adanya penunggakan pembayaran pajak kendaraan di kota Sukabumi. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi salah satu alasan masyarakat tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya penolakan kenaikan tarif pajak air permukaan oleh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sukabumi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Data yang diolah adalah data laporan realisasi pendapatan dari tahun 2020-2022. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan dokumentasi dan studi pustaka. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode sampling jenuh sehingga diperoleh 36 data sampel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak air permukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

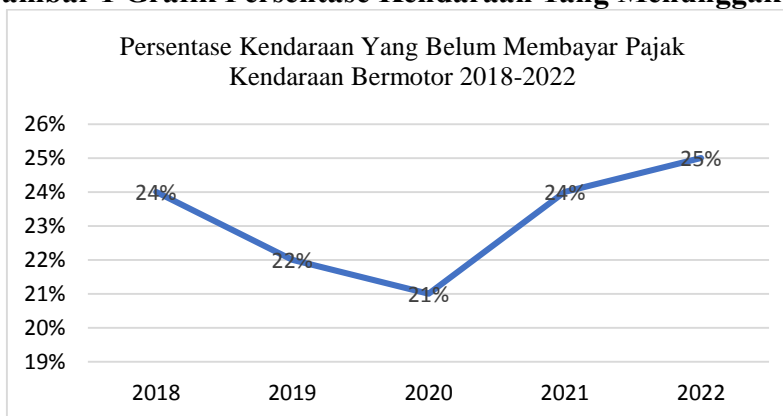
Otonomi diberikan pada suatu daerah kabupaten/kota dengan memberikan wewenang atau kebebasan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendapatan daerah, meningkatkan tingkat pengeluaran untuk membangun daerah, sehingga roda perkembangan daerah dapat berkembang lebih maju (Suprianto, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai urusan APBD atau belanja daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi sumber pendapatan daerah yang dinilai cukup tinggi bagi pemerintah daerah (Pangesti, 2020). Banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan dan meningkatnya jumlah kendaraan maka hal ini berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, masih terdapat penunggakan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak di kota Sukabumi, pada tahun 2022 jumlah penunggak pajak kendaraan tercatat 30,159 kendaraan yang menunggak pajak lebih dari dua tahun. 26,184 kendaraan roda dua dan 150 kendaraan roda empat. Selain itu masih ada masyarakat yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan dengan jumlah kendaraan 119 ribu untuk kendaraan roda dua dan roda empat (radarsukabumi, 2022)

Gambar 1 Grafik Persentase Kendaraan Yang Menunggak



Sumber: Open Data Jabar dan Badan Pusat statistik Kota Sukabumi, diolah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi salah satu alasan masyarakat tidak membayar pajak kendaraan bermotor, disebabkan karena pembelian kendaraan bekas (second hand) atau kendaraan dalam proses kredit. Balik nama kendaraan bermotor yaitu proses pemindahan kepemilikan kendaraan dan perubahan identitas pemilik kendaraan dari pemilik pertama ke pemilik kedua atau selanjutnya.

Sumber pendapatan asli daerah juga berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang termasuk ke dalam pajak daerah. Pemprov Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan (SK) Gubernur

Jawa Barat Nomor 610/Kep.713.DSDA/2021 mengenai tarif Pajak Air Permukaan (PAP). Dalam surat keputusan (SK) tersebut tarif Pajak Air Permukaan yang berlaku di Jawa Barat naik secara signifikan. Pemprov Jawa Barat menaikkan tarif pajak air permukaan pada tahun 2021 yaitu hampir 1000% dari tarif semula dan dikenakan pungutan sama rata di tiap kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, kebijakan tersebut membuat 27 daerah kabupaten/kota di Jawa Barat menolak kebijakan mengenai kenaikan tarif pajak air permukaan (Assifa, 2021).

Tabel 1 Data Pendapatan Asli Daerah Di UPTD P3DW Kota Sukabumi

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2020	163.080.980.028	142.637.116.676	87,46%
2021	148.661.080.644	156.817.236.807	105,47%
2022	171.169.498.632	177.276.814.745	103,57%

Sumber: UPTD P3DW Kota Sukabumi

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Sukabumi Pada tahun 2020 tidak mencapai target yaitu hanya mencapai 87,46%. Pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sudah melampaui target anggaran.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi (studi kasus pada Bapenda Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Kota Sukabumi)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah

TINJAUAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (Salim & Haeruddin, 2019:11).

Menurut Salim & Haeruddin (2019:16) ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat
 - a. Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

- b. Pajak Langsung (*direct tax*)
Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat di kantor pajak.
2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut
 - a. Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri.
 - b. Pajak Negara (Pusat)
Pajak negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Dirjen pajak.
3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak
 - a. Pajak Objektif
Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya.
 - b. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, jenis pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat yang operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Siahaan, 2016).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan pertama kendaraan pribadi, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen)
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenalan diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 - a. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%
 - b. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%
 - c. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%
 - d. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%

Menurut Siahaan (2016:186) besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat penyerahan dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 12,5%
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

Secara umum perhitungan pajak BBNKB adalah dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \end{aligned}$$

Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Tarif pajak air permukaan yang ditetapkan Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 yaitu sebesar 10%. Secara umum perhitungan pajak air permukaan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Permukaan} \end{aligned}$$

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak kendaraan bermotor termasuk sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dimana, semakin tinggi jumlah kendaraan yang terdaftar di suatu wilayah daerah, maka semakin besar kemungkinan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk pemerintah daerah, jika Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat dan sebaliknya (Nardiansyah, 2020). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2020), Nardiansyah (2020), dan Saputra & Putri (2020) menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sukabumi

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari pajak kendaraan bermotor, karena proses pembayaran pajak kendaraan bermotor otomatis terjadi pada saat transaksi jual beli (Rakatitha & Gayatri, 2017). Semakin meningkat kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) maka akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah (PAD) (Nardiansyah, 2020). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2020) menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sukabumi

Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak air permukaan (PAP) biasanya diterapkan untuk perusahaan atau industri yang menggunakan air permukaan untuk kebutuhan operasionalnya. Pajak air permukaan merupakan

pajak yang dipungut atas pengambilan air sungai, waduk, danau, dan sebagainya (Pangesti, 2020). Semakin banyak perusahaan atau industri yang menggunakan air permukaan di suatu daerah, semakin besar peluang penerimaan pajak air permukaan untuk pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah (Delima *et al.*, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian Delima dkk (2022) menunjukkan bahwa Pajak Air Permukaan berpengaruh positif serta signifikan pada PAD (PAD) diterima. Apabila hasil pengambilan pajak air permukaan bertambah, maka PAD meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh pajak air permukaan (PAP) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota sukabumi

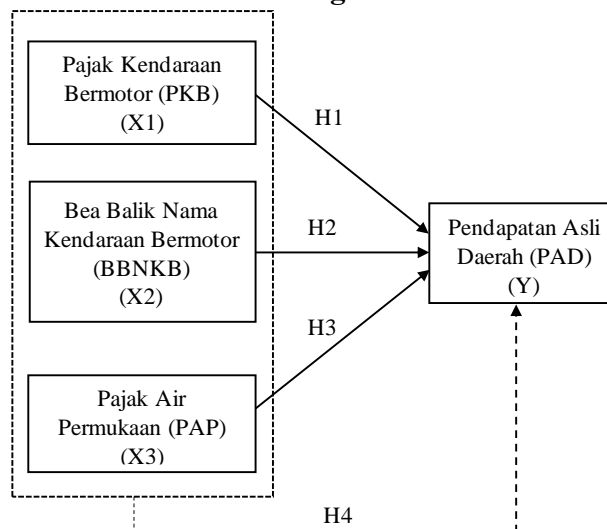
Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak air permukaan (PAP) terhadap pendapatan asli daerah merupakan indikator penting yang dianggap sebagai tingkat otonomi pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah (Pangesti, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pangesti, 2020) menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Terdapat pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak air permukaan (PAP) secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sukabumi.

Gambar 2 Paradigma Penelitian



METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan di Kota Sukabumi tahun 2020 – 2022 dengan rincian dari bulan Januari sampai bulan Desember, sehingga diperoleh 36 data sampel. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik

nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada berupa laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan studi pustaka berupa jurnal, buku, penelitian terdahulu. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinan, uji hipotesis secara parsial dan simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumis Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021:196) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PKB	BBNKB	PAP	PAD
N		36	36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	46.3119	52.0211	4.6294	50.6947
	Std. Deviation	29.23716	30.24642	2.31431	29.36239
Most Extreme Differences	Absolute	.098	.089	.132	.091
	Positive	.098	.089	.132	.079
	Negative	-.082	-.080	-.077	-.091
Test Statistic		.098	.089	.132	.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.119 ^c	.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah dengan SPSS.25.0

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2 tailed) yang diperoleh untuk variabel PKB sebesar 0.200, BBNKB sebesar 0.200, PAP sebesar 0.119 dan PAD sebesar 0.200. karena signifikansi yang dihasilkan keempat variabel berada di atas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas atau data PKB, BBNKB, PAP dan PAD berdistribusi normal. Adapun pengujian menggunakan grafik normal P-Pot sebagai berikut:

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2021:157) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
PKB	.157	6.377
BBNKB	.199	5.030
PAP	.263	3.806

Sumber : Data diolah dengan SPSS.25.0

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai torelance dan VIF terlihat bahwa angka torelance dan VIF pada variabel PKB sebesar 0.157 dan 6.377 , pada variabel BBNKB sebesar 0.199 dan 5.030, dan pada variabel PAP sebesar 0.263 dan 3.806. artinya nilai torelance > 0,10 dan VIF < 10 maka dapat disimpulkan berdasarkan nilai tolerance dan VIF bahwa untuk tiga variabel bebas model regresi tersebut tidak terjadi mutikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2021:162) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.964 ^a	.929	.922	8.19609	1.933

Sumber : Data diolah dengan SPSS. 25.0

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji korelasi yang menggunakan durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1.933. Nilai dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson tabel untuk $n = 36$ dan $k = 3$ (jumlah variabel independen), maka nilai $dl = 1.2953$ dan nilai $du = 1.6539$. maka dapat disimpulkan bahwa nilai $du < d < 4 - dl$ dimana $1.6539 < 1.933 < (4 - 1.2953)$, artinya tidak ada autokorelasi positif dan negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021:178) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model		Sig.
1	(Constant)	.618
	PKB	.629
	BBNKB	.456
	PAP	.622

Sumber : Data diolah dengan SPSS. 25.0

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan signifikan variabel bebas pajak kendaraan bermotor 0,629 pada variabel bea balik nama kendaraan bermotor signifikan 0,456 dan pada variabel pajak air permukaan nilai signifikan 0,622 yang berarti ketiga variabel $> 0,05$. Maka dapat dikategorikan bahwa model regresi ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2022:192) regresi linier berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan beberapa variabel independen.

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-11.610	10.214		-1.137	.264
	PKB	.912	.120	.908	7.620	.000
	BBNKB	8.197	3.898	.223	2.103	.043
	PAP	-2.240	1.168	-.177	-1.918	.064

Sumber : Data diolah dengan SPSS.25.0

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan regresi linear berganda diperoleh untuk variabel X1 = 0.912, variabel X2 = -8.197 dan variabel X3 = -2.240 dengan konstanta -11.610. sehingga diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -11.610 + 0.912 + 8.197X_2 + (-2.240)X_3 + e$$

Koefesien dari masing-masing variabel tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar - 11.610, artinya apabila semua variabel independen (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan) tidak dimasukkan ke dalam model regresi maka nilai pendapatan asli daerah sebesar - 11.610
2. Koefesien X1 Pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 0.912 artinya jika current ratio sebesar satu satuan, maka tingkat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan menurun sebesar 0.912
3. Koefesin X2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 8.197 artinya jika setiap peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor satu satuan dapat menyebabkan kenaikan sebesar 8.197
4. Koefesien X3 Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar -2.247 menunjukkan setiap peningkatan pajak air permukaan sebesar satu satuan dapat menyebabkan penurunan sebesar 2.240

Uji Hipotesis

Uji Parsial

Menurut Ghozali (2021:148) uji t (parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 7 Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
		Beta				
1	(Constant)	-11.610	10.214		-1.137	.264
	PKB	.912	.120	.908	7.620	.000
	BBNKB	8.197	3.898	.223	2.103	.043
	PAP	-2.240	1.168	-.177	-1.918	.064

Sumber : Data diolah dengan SPSS.25.0

Berdasarkan uji statistisk t pada tabel di atas diketahui bahwa:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)
Berdasarkan tabel di atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diperoleh nilai t-hitung yaitu 7,620 pada derajat bebas (df) = n - k = 36 - 4 = 32 dengan tingkat signifikan 5% sehingga di peroleh nilai t-tabel sebesar 2,03693. Karena t-hitung 7,620 > 2,03693 (t-tabel) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima, artinya pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)
Berdasarkan tabel di atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperoleh nilai t-hitung yaitu 2,103 pada derajat bebas (df) = n - k = 36 - 4 = 32 dengan tingkat signifikan 5% sehingga di peroleh nilai t-tabel sebesar 2,03693. Karena t-hitung 2,103 > 2,03693 (t-tabel) dan nilai signifikan sebesar 0.043 < 0.05 maka hipotesis diterima, artinya bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
3. Pajak air permukaan (X3) terhadap Pendapatan asli Daerah (Y)
Berdasarkan tabel di atas Pajak Air Permukaan (PAP) diperoleh nilai t-hitung yaitu -1,918 pada derajat bebas (df) = n - k = 36 - 4 = 32 dengan tingkat signifikan 5% sehingga di peroleh nilai t-tabel sebesar 2,03693. Karena t-hitung -1,918 < - 2,03693 (t-tabel) nilai

signifikan sebesar $0.064 > 0.05$ maka hipotesis ditolak, artinya pajak air permukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Uji Simultan

Uji F menurut Ghozali (2021:148) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan secara Bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Hasil Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28024.355	3	9341.452	138.978	.000 ^b
	Residual	2150.891	32	67.215		
	Total	30175.245	35			

Sumber : Data diolah dengan SPSS.25.0

Berdasarkan hasil uji statistik F tabel di atas, diperoleh nilai f-hitung sebesar 138,978 pada derajat bebas $df_1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 = n - k = 36 - 4 = 32$ dengan tingkat signifikan 5% maka diperoleh nilai f-tabel sebesar 2,90. Karena f-hitung $138,978 > 2,90$ (f-tabel) dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka hipotesis diterima, artinya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah.

Uji Koefisien Determinan

Menurut Ghozali (2021:147) koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya untuk kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 ^a	.929	.922	8.19609

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinan

Sumber : Data diolah dengan SPSS.25.0

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan, diketahui nilai adjusted R Square yaitu 92.2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 92.2% sedangkan sisanya sebesar 7.8% di pengaruhi oleh model lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini variabel pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t-hitung $7,620 > 2,03693$ (t-tabel) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, artinya pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat

Hal ini sejalan dengan penelitian Nardiansyah (2020) dan Aliyudin dkk (2022) yang menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Majalengka. Artinya semakin banyaknya jumlah kendaraan dalam

suatu daerah maka akan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat pula dan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t -hitung $2,103 > 2,03693$ (t -tabel) dan nilai signifikan sebesar $0.043 < 0.05$ maka hipotesis diterima, artinya bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nardiansyah (2020) yang menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten kaur, Bengkulu selatan, dan selama 2010-2019, di mana bea balik nama kendaraan bermotor secara rata-rata setiap tahunnya memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini pajak air permukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan Karena t -hitung $-1,918 < -2,03693$ (t -tabel) nilai signifikan sebesar $0.064 > 0.05$ maka hipotesis ditolak, artinya pajak air permukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Widya, 2020) menyatakan bahwa pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan menurut penelitian (Pangesti, 2020) yang menunjukkan bahwa Pajak Air Permukaan (PAP) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, karena masih banyaknya obyek Pajak Air Permukaan baru yang belum terdata ataupun terdaftar untuk menjadi wajib pajak obyek air permukaan, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah untuk pemanfaat air permukaan. Sehingga hal ini menyebabkan Pajak Air Permukaan (PAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan f -hitung $138,978 > 2,90$ (f -tabel) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, artinya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Pangesti, 2020) yang menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Tengah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan hasil perhitungan uji t -hitung $7,620 > 2,03693$ (t -tabel) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor maka akan meningkat pula pendapatan asli daerah
2. Bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dibuktikan dengan hasil perhitungan t -hitung $2,103 > 2,03693$ (t -tabel) dan nilai

signifikan sebesar $0.043 < 0.05$. Artinya semakin tinggi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor maka akan meningkat pula pendapatan asli daerah

3. Pajak air permukaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan hasil perhitungan t-hitung $-1,918 < -2,03693$ (t-tabel) nilai signifikan sebesar $0.064 > 0.05$ Artinya penerimaan pajak air permukaan tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah
4. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah hasil perhitungan f-hitung $138,978 > 2,90$ (f-tabel) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

REFERENSI

- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Maknunah, R. A. (2022). Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah Penerapan E-Samsat. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 1(1). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/18520>
- Assifa, F. (2021). *Pajak Air Naik 1.000 Persen Lebih, PDAM Tasikmalaya Gugat Gubernur Jabar*. Kompas. <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/19/094505981/pajak-air-naik-1000-persen-lebih-pdam-tasikmalaya-gugat-gubernur-jabar?page=all>
- Badan Pusat statistik Kota Sukabumi. (n.d.). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Sukabumi (Unit), 2018-2020*. <https://sukabumikota.bps.go.id/indicator/17/390/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-di-kota-sukabumi.html>.
- Delima, P., Rismansyah, R., & Nurmala, N. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 248. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7866>
- Ferdiansyah, F. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671>
- Ghozali, I. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
- Nardiansyah, P. (2020). *Pengaruh Kontribusi PKB dan BBNKB Terhadap PAD Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur di Provinsi Bengkulu*. <http://repo.umb.ac.id/files/original/2cbf8187ee57f93d3d666f15b145c4a4.pdf>
- Pangesti, N. A. (2020). ... *Bermotor (Pkb), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb), Dan Pajak Air Permukaan (Pap) Terhadap Pendapatan Asli Daerah* Core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/335075179.pdf>
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan. (n.d.). <https://bapenda.jabarprov.go.id/cabang-pelayanan-pendapatan-daerah-kota-sukabumi/>
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Punguta. (n.d.). PERATURAN_GUBERNUR_JAWA_BARAT_NOMOR_2_TAHUN_2020.pdf (jabarprov.go.id).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- (n.d.). <https://bapenda.jabarprov.go.id/cabang-pelayanan-pendapatan-daerah-kota-sukabumi/>.
- radarsukabumi. (2022). *30 Ribu Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi Tidak Bayar Pajak*. Radarsukabumi. <https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/30-ribu-kendaraan-bermotor-di-kota-sukabumi-tidak-bayar-pajak/>
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia). *LPP-Mitra Edukasi*, 1–459.
- Saputra, E., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh PKB, BBNKB, Dan PBBKB Terhadap PAD (Studi pada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 – 2019). *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 3(3), 134–144.
- Siahaan, M. P. (2016). *PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Suprianto, K. (2020). *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Jeneponto* [Universitas Hasanuddin Makasar]. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/590/2/A022171013_tesis cover-bab2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/590/2/A022171013_tesis%20cover-bab2.pdf)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widya, R. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) Dan *Kindai*. <https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/kindai/article/view/592>